

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH, TRANPARANSI PUBLIK, DAN AKTIVITAS
PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KEUANGAN SKPD DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



Nama : Arif Hidayat

NIM : 222015185

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH, TRANPARANSI PUBLIK, DAN AKTIVITAS
PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KEUANGAN SKPD DI KOTA PALEMBANG**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Arif Hidayat
NIM : 222015185**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Hidayat
NIM : 222015185
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul : Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik, dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD Di Kota Palembang

Denga ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang yang telah di cantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang,

2020



Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,
Tranparansi Publik, Dan Aktivitas Pengendalian
Terhadap Akuntabilitas Keuangan Skpd Di Kota
Palembang
Nama : Arif Hidayat
Nim : 222015185
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Study : Akuntansi
Mata kuliah pokok : Akuntansi Sektor Publik

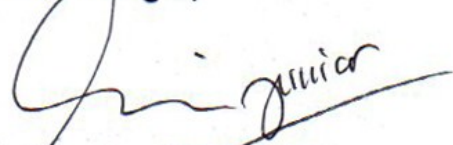
Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 2020

Pembimbing I,



Drs. Sunardi, SE. M.Si
NIDN/NBM: 020604630/784021

Pembimbing II,



Lis Djuniar, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0220067101/1115716

Mengetahui,
Dekan

u.b. ketua Program Studi Akutansi



Betri, S.E., M.Si., Ak., CA

NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap (Q.S. Al-inssyirah:6-8)

*“Kebahagiaan adalah ketika apa yang anda pikirkan,
apa yang anda katakan, dan apa yang anda lakukan selaras”*

(Mahatma Gandhi)

*“Anggaplah hari ini adalah hari terakhirmu, agar kamu dapat menyebarkan
kebaikan untuk dirimu sendiri dan orang lain”*

(Penulis)

(Arif Hidayat)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ **Bapakku (Tarmizi) dan Ibukku (Komaria)**
- ❖ **Keluargaku dan Teman Terbaiku**
- ❖ **Dosen Pembimbing Skripsi**
- ❖ **Almamater Kebanggaanku**



PRAKATA

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat hidup dan segala karunia-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Atas rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD Di Kota Palembang, sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Palembang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepad Allah SWT yang selalu memberikan rezeki dan nikmat baik kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis dan kedua orang tuaku Bapak Tarmizi dan Ibu Komaria yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan senantiasa memberikan semangat, dan dukungan serta doa yang tiada hentinya bagi penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pak Drs. Sunardi S.E, M.Si dan ibuk Lis Djuniar, S.E,. M.Si. yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran dengan tulus dan ikhlas. Penulis juga mengucapkan terima kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Ketua Jurusan Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina S.E., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Nurul Hutami Ningsih, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta staf pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
8. Seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, AAMIIN.

Palembang, Agustus 2020

Penulis

Arif Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS.....	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Teori Kontingensi	8
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	8
3. Transparansi Publik	12
4. Aktivitas Pengendalian	13
5. Akuntabilitas Keuangan	14
6. Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah	18
B. Penelitian Sebelumnya	20
C. Hipotesis Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. LOKASI PENELITIAN.....	26
C. Operasionalisasi Variabel	26
D. Populasi dan Sampel	29
E. Sampel	29
F. Data Yang Diperlukan.....	30
G. Metode Pengumpulan Data	30
H. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Gambaran Umum Dinas Kota Palembang	43
B. Pembahasan.....	72

1. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan.....	72
2. Pengaruh Transparansi Publik Terhadap Akuntabilitas Keuangan	74
3. Pengaruh Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan	75
4. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan	76
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Survey Pendahuluan	4
Tabel II. 1 Penelitian Sebelumnya	22
Tabel III. 1 Daftar Lokasi Penelitian SKPD di Kota Palembang	26
Tabel III. 2 Operasionalisasi Variabel	27
Tabel III. 3 Populasi	29
Tabel IV. 1 Reliasisasi Akuntabilitas Anggaran Dinas Kota Palembang Tahun 2018-2019	47
Tabel IV. 2 Deskripsi Jawaban Variabel Akuntabilitas Keuangan	50
Tabel IV. 3 Deskripsi Jawaban Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	53
Tabel IV. 4 Deskripsi Jawaban Variabel Transparansi Publik	55
Tabel IV. 5 Deskripsi Jawaban Variabel Aktivitas Pengendalian	57
Tabel IV. 6 Hasil Pengujian Validitas Kuisisioner Variabel Akuntabilitas Keuangan	59
Tabel IV. 7 Hasil Pengujian Validitas Kuisisioner Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	60
Tabel IV. 8 Hasil Pengujian Validitas Kuisisioner Variabel Transparansi Publik	61
Tabel IV. 9 Hasil Pengujian Validitas Kuisisioner Variabel Aktivitas Pengendalian	61
Tabel IV. 10 Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen	63
Tabel IV. 11 Hasil Uji Normalitas	65
Tabel IV. 12 Hasil Uji Multikolinieritas dengan VIF dan Tolerance	66
Tabel IV. 13 Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson	67
Tabel IV. 14 Hasil Regresi Linear Berganda	68
Tabel IV. 15 Uji Determinan (Uji R ²)	69
Tabel IV. 16 Hasil Pengujian Hipotesis IV	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran	23
Gambar IV. 1 Usia Responden.....	49
Gambar IV. 2 Profil Pendidikan Responden	49
Gambar IV. 3 Masa Kerja Responden.....	50
Gambar IV. 4 Grafik Scatterplot	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : **KUESIONER PENELITIAN**

Lampiran 2 : **Hasil Pengujian Validitas Kuisisioner Variabel Akuntabilitas Keuangan**

Lampiran 3 : **Hasil Pengujian Validitas Kuisisioner Variabel Aktivitas Pengendalian**

Lampiran 4 : **Hasil Pengujian Validitas Kuisisioner Variabel Transparansi Publik**

Lampiran 5 : **Hasil Pengujian Validitas Kuisisioner Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Abstract

INFLUENCE OF IMPLEMENTATION OF FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM FOR PUBLIC TRANSPARENCY AND CONTROL ACTIVITIES ON THE FINANCIAL ACCOUNTABILITY OF SKPD IN PALEMBANG CITY

Arif Hidayat, NIM. 222015185 (2020) influence of implementation of regional financial accounting system for public transparency and control activities of SKPD financial accountability in Palembang

The problem in this research is how the implementation of the financial accounting system for public transparency and control activities on the financial accountability of SKPD in Palembang City. The purpose of this research is to determine the implementation of financial accounting system for public transparency and control activities on the financial accountability of SKPD in Palembang. This research includes comparative research. The data used in this study are primary and skunder data. The methods of data collection used are questionnaire, observation and interviews. Data analysis is qualitative. And the Likert scale analysis technique is qualitative descriptive data analysis. The results of this study showed that the subchapter describes the general picture of Palembang's service, the characteristics of respondents, data descriptions, and data analysis.

Keywords: implementation of financial accounting system, public transparency, activity control, financial accountability

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TRANSPARANSI PUBLIK DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN SKPD DI KOTA PALEMBANG

Arif Hidayat, NIM. 222015185 (2020) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD Di Kota Palembang

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD Di Kota Palembang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD Di Kota Palembang . Penelitian ini termasuk penelitian Komparatif. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah kuisisioner, observasi dan wawancara. Analisis data adalah kualitatif. Dan skala likert Teknik Analisis adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menguraikan subbab mengenai gambaran umum dinas kota Palembang, karakteristik responden, deskripsi data, dan analisis data.

Kata kunci: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Transparansi Publik, Aktivitas Pengendalian, Akuntabilitas Keuangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Organisasi Sektor Publik, Pemerintah Daerah dituntut bisa menyajikan laporan keuangan yang memiliki akuntabilitas yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggapan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut.

Menurut Abdul (2016: 56) Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Muindro, 2012: 14). Menurut Kerangka Konseptual, Standar Akuntansi Pemerintah, 2015 Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka.

Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan karena sering memonitor setiap perencanaan pemerintah dalam satu periode. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah berkewajiban untuk membuat laporan pertanggung-jawaban keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan Daerah.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Erlina dan Rasdianto (2013) adalah “sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dengan adanya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah laporan keuangan yang dihasilkan lebih jelas dan mudah dipahami serta dapat dibuktikan kebenarannya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa “setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja”.

Sesuai dengan bentuk pemerintahan yang kita anut yaitu Demokrasi bahwa semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan untuk ikut terlibat dalam pembuatan keputusan pemerintah seperti hak untuk mendapatkan informasi keuangan negara. Masyarakat berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan itu sebabnya dibutuhkan adanya transparansi publik.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga terciptanya pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2006: 68).

Selain itu juga diperlukan aktivitas pengendalian, dengan adanya aktivitas pengendalian memudahkan suatu organisasi memantau aktivitas dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya atau seperti apa yang telah direncanakan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai yang diinginkan, misalnya dalam menyajikan Laporan Realisasi Anggaran Daerah terdapat kesalahan dalam pencatatan melalui

aktivitas pengendalian dampak kedepannya dapat diantisipasi dengan secepatnya sehingga tidak merugikan semua pihak yang terlibat, dengan selalu mengevaluasi Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu contoh dari aktivitas pengendalian, sehingga laporan keuangan tetap akuntabel.

Penelitian Rahman (2008) mengatakan penerapan azas akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengharuskan pemerintah memberikan pertanggungjawaban dan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan pemerintahan sehingga pemerintah berusaha untuk memberikan yang terbaik (kinerja terbaik) kepada masyarakat.

Berdasarkan penelitian Isma (2012) menghasilkan temuan bahwa implementasi akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah mampu meningkatkan kinerja. M. Nasir (2007) mengatakan bahwa implementasi akuntabilitas dan transparansi menyebabkan kontrol yang besar dari masyarakat menyebabkan pengelolaan pemerintahan akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, dan pada akhirnya akan mampu menghasilkan kinerja pemerintahan dengan baik.

Tabel I. 1
Survey Pendahuluan

Instansi SKPD di Kota Palembang	Kondisi yang ditemukan
Dinas Sosial	Saat melakukan wawancara, muncul keadaan dimana sistem akuntansi keuangan pada instansi tersebut kurang baik karena rendahnya kualitas laporan keuangan, di sebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintah dan kurangnya kompetensi staf akuntansi yang ada

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencan	Saat melakukan wawancara, muncul keadaan dimana kurangnya pengendalian intern yang ada pada instansi tersebut karena masih ada oknum yang melakukan penyelewengan dan pemborosan serta buruknya pengawasan di instansi tersebut
Dinas Kesehatan	Saat melakukan wawancara, muncul keadaan dimana lemahnya transparansi informasi keuangan kepada publik, dikarenakan betapa sulitnya mendapatkan data riil dari instansi tersebut sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan kebijakan publiknya.

Sumber: Penulis, 2020

Berdasarkan tabel I.1 menunjukkan bahwa pada instansi di kota Palembang banyak ditemukan adanya masalah yang berdampak negatif pada instansi tersebut seperti penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi, adanya penyelewengan dan pemborosan serta buruknya pengawasan pada instansi tersebut, dan kurangnya transparansi kepada masyarakat sehingga sulit melakukan pengawasan kebijakan publik.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparasi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD Di Kota Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Tranpasransi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD di Kota Palembang

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD dipemerintahan Kota Palembang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Sebagai bukti empiris yang ada tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan SKPD di Kota Palembang

2. Bagi Pemerintahan

sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya SKPD di Kota Palembang dalam rangka mewujudkan *good governance*

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan tentang penerapan sistem akuntansi keuangan daerah transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan SKPD di Kota Palembang

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manap. (2016). *Revolusi Manajemen Pemasaran*. Edisi Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Erlina dan Rasdiyato, (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, USU Press, Medan.
- Elisha, (2010). Pengaruh Independensi, Pengalaman, *Due Professional Care* dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit
- Firmansyah, (2008). Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKAD) dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Survei Pada Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Isma, (2012). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah
- Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Muindro Reyowijoyo. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP transparansi
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Persyaratan Standar Akuntansi Pemerintah.
- Rahman. (2008). Pengaruh Akuntabilitas, Tranparasi Terhadap Komitmen Organisasi pada SKPD Kota Yogyakarta
- Romie, Priyastama. (2017). *Buku Sakti Kuasai SPSS: Pengolahan dan Analisa Data. Start Up*, Yogyakarta.
- Saputra, (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD di Pemerintahan Kabupaten Bintan.
- Smith, (2004). *Regulatory Transparency In OECD Countries: Overview, Trends a,d Challenges, Australian: Journal of Public Administration*.
- Soleha, (2011). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan di Pemerintahan Provinsi Banten.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syahirman, dkk (2016), *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Uma Sekaran. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.